

## **SINOPSIS**

Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Pusat selama ini masih banyak mengalami masalah pada saat implementasi, mulai dari birokrasi yang sangat rumit hingga pemotongan-pemotongan dana yang dilakukan aparat pelaksana program demi kepentingan pribadi. Selain itu program-program yang dibuat Pemerintah Pusat selama ini berfokus pada bantuan dan perlindungan sosial seperti BLT dan JPS. Tentu saja bantuan seperti ini tidak dapat mengubah masyarakat dari jurang kemiskinan. Adanya pilot project penanggulangan kemiskinan yang di buat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman membawa angin segar dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Sleman, Karena program-program yang dibuat dalam pilot project ini lebih terfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu memaparkan dan menjelaskan data melalui penalaran berdasarkan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data yang dianalisis , sehingga dapat menunjukkan gambaran situasi secara sistematis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti tanpa menggunakan penghitungan statistik. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, interview dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program yang dilaksanakan di Desa Margoluwih menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaannya mulai dari kurangnya koordinasi yang dilakukan dinas-dinas pendukung dengan aparat pelaksana, hingga buruknya kualitas aparat pelaksana karena faktor pendidikan aparat yang rata-rata hanya berpendidikan SMA. Ini terjadi karena sulitnya mencari personil yang mau bekerja karena insentif yang diberikan dirasa kurang memenuhi standar. Selain itu Pemerintah Desa tidak melakukan transparansi dana program sehingga Pemerintah Desa tidak dapat memberikan data tentang penggunaan dana program. Dengan permasalahan-permasalahan seperti ini tentunya proses pelaksanaan program dalam pilot project penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih tidak dapat berjalan sesuai dengan mekanisme program yang telah di rencanakan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Desa Margoluwih mengalami peningkatan yang signifikan, ini menandakan bahwa pilot project penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih belum berhasil.

Rekomendasi yang diberikan secara garis besar adalah pertama, untuk selalu mengadakan koordinasi antara aparat pelaksana program dengan TKPKD maupun dengan dinas-dinas pendukung, kedua, seharusnya aparat pelaksana yang dipilih memiliki kompetensi yang baik, ketiga, adanya pemberian sanksi pada aparat pelaksana program yang dinilai tidak kooperatif dalam melaksanakan program, keempat, harus ada transparansi data yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam penyaluran dana program, kelima, komitmen harus di tanamkan kepada aparat pelaksana agar aparat bekerja dengan maksimal, karena jika aparat pelaksana tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan sebuah program, maka program yang dilaksanakan akan tidak terorganisir dengan baik